

**FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN:  
STUDI KASUS PADA DESA TALONTAM KECAMATAN BENAI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**Oleh: Lilis Gustiani**

Email: [lilis.gustiani6476@student.unri.ac.id](mailto:lilis.gustiani6476@student.unri.ac.id)

**Pembimbing: M. Rafi, S.I.P., M.I.P**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax.0761-63277

**ABSTRAK**

*This research is based on problems related to the function of the village government in development in the agricultural sector, which includes irrigation which still does not irrigate all rice fields, the minimal APBDes budget in the agricultural sector and limited road access to rice fields in Talontam Village. Therefore, the aim of this research is to determine the function of the village government in development in the agricultural sector and the obstacles faced by the village government in development in the agricultural sector in Talontam Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency.*

*The research method used in this research is descriptive qualitative, where the location of this research is in Talontam Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. Then, the data collection techniques used were interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis techniques which describe data and information based on existing facts and then analyzed systematically.*

*The results of this research show that the government's function in development in the agricultural sector in Talontam Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency can be seen in several functions, namely; First, the development function is related to the creation of water channel irrigation, procurement of superior varieties of seeds and agricultural technology. Second, the service function is related to the distribution of fertilizer, seeds and control of pests and diseases. Third, the empowerment function in development in the agricultural sector is related to the existence of a guidance program for local farmers. Furthermore, there are several obstacles faced by the Talontam Village Government in development in the agricultural sector, namely the lack of APBDes in the agricultural sector, problems related to land area, problems in food productivity, climate change and a lack of agricultural infrastructure which causes the function of the village government in development in the agricultural sector is not yet optimal.*

*Keywords: Government Functions, Village Government, Development, Agriculture.*

## A. PENDAHULUAN

### 1) LATAR BELAKANG MASALAH

Secara fundamental, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diuntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas. Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Nur Fachri Kurniawan 2020).

Hakikat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: (1) Pelayanan (service), (2) Pemberdayaan (empowerment), (3) dan Pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Rahman 2018).

Pemerintah desa berperan sebagai penggerak utama dalam menyusun kebijakan pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal. Melalui proses partisipatif, pemerintah desa dapat melibatkan petani, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi pertanian di wilayah desa tersebut. Kebijakan ini dapat mencakup pengelolaan lahan pertanian, penggunaan air, pengendalian hama dan penyakit, serta pengembangan kelembagaan pertanian (Farhan Thariq, Rofiyanti, and Agustina 2023).

Selain itu pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Hal ini meliputi pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur pertanian seperti jalan desa, irigasi, jaringan listrik, dan pusat penjualan produk pertanian. Pemerintah desa juga dapat memfasilitasi akses petani ke sumber daya produksi seperti benih unggul, pupuk, dan alat pertanian yang modern dan efisien (Simbolon et al. 2021)

Fungsi Pemerintah desa dalam pembangunan pertanian khususnya padi dapat mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) Pengelolaan Lahan Pertanian, Pemerintah desa dapat mengawasi dan mengatur penggunaan lahan pertanian secara efisien, termasuk pemilihan varietas padi yang sesuai, teknik budidaya yang baik, dan pemeliharaan lahan pertanian. (2) Pendistribusian Benih Padi: Pemerintah desa dapat memfasilitasi distribusi benih padi berkualitas kepada petani untuk memastikan ketersediaan benih yang baik. (3) Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian: Pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan pertanian kepada petani agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam budidaya padi yang efektif. (4) Pengaturan Irigasi: Menjaga infrastruktur irigasi dan sistem pengairan yang berfungsi dengan baik untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi tanaman padi. (5) Pemantauan Harga dan Pasar: Memantau harga padi di pasar lokal dan regional, serta mengambil tindakan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan. (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan produksi padi.

Pembangunan pertanian merupakan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator

dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani agar memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya (Lepa, Pangemanan, and Rachman 2019).

Pertanian adalah sektor yang banyak dihuni masyarakat pedesaan di negara berkembang, Proporsi luas lahan yang dimanfaatkan untuk usaha tani khususnya yang beririgasi dan lahan pertanian bukan sawah sedikit banyak juga menggambarkan kemajuan pembangunan sektor pertanian. Proporsi desa yang menjadikan komoditas pangan sebagai komoditas pertanian unggulan tergolong tinggi (Ristiadi, 2017). Berikut adalah beberapa indikator ketahanan pangan yang umum digunakan yaitu, ketersediaan pangan: mengukur jumlah produksi pangan suatu wilayah dan ketersediaan pangan perkapita, akses pangan: melibatkan indikator yang menilai kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup secara fisik maupun ekonomis, kualitas pangan, stabilitas pangan, pola makan dan gizi dan ketangguhan pangan terhadap bencana (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018).

Desa Talontam memiliki luas lahan sawah seluas 45 hektar dengan hasil produksi padi yang diperoleh berjumlah 5,2 ton per hektarnya, dengan jumlah produksi selama setahun dua kali tanam, namun hal tersebut masih belum mencukupi untuk ketahanan pangan di Desa Talontam dikarenakan masih terdapat masyarakat yang membeli beras dari luar yang berarti hasil produk padi Desa Talontam belum mencukupi untuk kebutuhan pangan (Pemerintah Desa Talontam, 2023).

Pembangunan pertanian di Desa Talontam didukung oleh pemerintah pusat dan difasilitasi oleh pemerintah desa melalui pembangunan saluran irigasi untuk sawah masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran dan

penggunaan dana desa untuk pembuatan saluran irigasi di Desa Talontam sangat diapresiasi oleh masyarakat desa, terutama oleh para petani yang sawahnya dialiri oleh irigasi tersebut. Sebelumnya, petani menghadapi kendala karena sawah yang mereka olah untuk ditanami padi hanya mendapatkan air saat hujan turun.

UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah lebih membuka peluang partisipasi masyarakat dan upaya pemberdayaan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu pada perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian, Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangat jelas dibunyikan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi dari kegiatan pembangunan pertanian untuk memaksimalkan hasil pertanian di Desa Talontam terhadap ketahanan pangan khususnya padi. Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini dikarenakan hasil produksi yang kurang maksimal akibat beberapa faktor seperti: musim kemarau, banjir, saluran irigasi yang rusak serta masih terdapat beberapa sawah yang belum mempunyai saluran irigasi untuk dialiri air, sarana jalan yang merupakan akses menuju pusat kota sudah diaspal namun jalan akses pertanian belum diaspal/diseminisasi.

Desa Talontam merupakan desa dengan mayoritas pencarian

masyarakatnya berada di bidang pertanian. Air merupakan elemen yang sangat penting demi kelangsungan kegiatan pertanian terutama untuk komoditi padi, masalah yang ada di Desa Talontam yaitu terdapat adanya irigasi air yang tidak dialiri air atau terdapat kerusakan yang terdapat pada irigasi air di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penyebab rusaknya irigasi yang terdapat di Desa Talontam yaitu dikarenakan faktor usia pada irigasi dan curah hujan yang tinggi menyebabkan irigasi di tahun 2021 tidak mampu menahan debit air yang masuk. Irigasi Desa Talontam yang mengalami kerusakan tersebut dibangun pada tahun 2016 oleh pemerintah periode sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini terdapat beberapa permasalahan disektor pertanian yaitu: *Pertama*, irigasi, irigasi di Desa Talontam masih belum mengairi semua lahan sawah di Desa Talontam, terjadi kerusakan pada irigasi di Desa Talontam sehingga mengganggu aliran air ke lahan sawah petani. *Kedua*, minimnya anggaran APBDDes Desa Talontam di sektor pertanian sehingga memiliki infrastruktur yang kurang memadai dan belum mampu untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong hasil produksi bidang pertanian. *Ketiga*, akses jalan petani menuju lahan sawah masih kurang memadai, karena banyak jalan yang rusak sehingga menyulitkan petani untuk mengangkut hasil produksi padinya.

## 2) Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dapat dirumuskan masalah yang perlu diteliti yaitu:

1) Bagaimana fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di sektor pertanian

pada Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

2) Apa yang menjadi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan di sektor pertanian pada Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

## 3) Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di sektor pertanian pada Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan di sektor pertanian pada Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

## 4) Kerangka Teori

### 1) Fungsi Pemerintah

Menurut Rasyid dalam jurnal Ahmar dkk (2016) pemerintah mempunyai fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowment), dan pembangunan (develompent). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Fungsi pemerintahan dalam pembangunan mencakup berbagai peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan secara Berkelanjutan (Siagian, 2014). Berikut ini adalah beberapa fungsi utama pemerintahan dalam pembangunan:

1. Perencanaan Pembangunan: Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan rencana dan kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek untuk

- mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan.
2. **Pengelolaan Ekonomi:** Pemerintah memiliki peran dalam mengelola perekonomian negara atau wilayah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
  3. **Infrastruktur dan Pelayanan Publik:** Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
  4. **Investasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Pemerintah berperan dalam mengalokasikan dana untuk investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan agar sumber daya manusia dapat berkembang secara optimal.
  5. **Penyediaan Layanan Sosial:** Pemerintah harus menyediakan layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  6. **Perlindungan Lingkungan:** Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah degradasi lingkungan.
  7. **Regulasi dan Pengawasan:** Pemerintah memiliki fungsi untuk mengeluarkan regulasi dan

- kebijakan yang mengatur berbagai sektor dalam masyarakat agar berjalan secara adil, aman, dan sesuai dengan hukum.
8. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pemerintah harus memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan.
  9. **Stimulus dan Insentif Ekonomi:** Pemerintah dapat memberikan insentif atau stimulus ekonomi untuk mendorong investasi, penelitian, dan pengembangan teknologi.
  10. **Diplomasi dan Kerjasama Internasional:** Pemerintah berperan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan melakukan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan pembangunan secara global.

Fungsi pemerintahan dalam pembangunan sangat kompleks dan beragam tergantung pada konteks dan karakteristik setiap negara atau wilayah. Melalui peran dan tanggung jawab ini, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **2) Fungsi Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi tentang Desa menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Dalam sistem administrasi Negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrument koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit Pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah “self governing society” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula. Setiawan, (2018). Konteks desa, definisi umum tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD), (Akbar, Suprpto and Surati, 2018).

### 3) Konsep Pembangunan pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam kehidupan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian juga memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu, meningkatnya pendapatan dan konsumsi masyarakat juga akan memberikan

pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Sehingga, pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan sangat perlu dilakukan untuk membantu pembangunan nasional Indonesia (Mubyarto, 1989).

Pembangunan pertanian merupakan upaya pemanfaatan sumber daya tanah dan air, serta hayati secara produktif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, bahan baku industri, ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di negara Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Sehingga, dalam pelaksanaan pembangunan pertanian harus memperhatikan tujuan utamanya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Berikut ini kendala yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan di sektor pertanian beserta sumber kutipannya meliputi: profil Kabupaten Kuantan Singingi dan deskripsi di Desa Talontam Kecamatan Benai

#### 1. Luas lahan pertanian yang terbatas

Lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang akibat alih fungsi lahan untuk permukiman, industri, dan infrastruktur. Hal ini mengurangi areal tanam dan produktivitas pertanian (Permana et al., 2018).

#### 2. Produktivitas pertanian rendah

Produktivitas padi dan palawija di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi, modal, sarana produksi, dan SDM petani (Permana et al., 2018).

#### 3. Kurangnya infrastruktur pertanian

Infrastruktur seperti irigasi, transportasi hasil panen, dan teknologi pascapanen yang belum memadai juga menghambat peningkatan produktivitas dan distribusi hasil pertanian (Permana et al., 2018).

#### 4. Perubahan iklim

Perubahan iklim berdampak pada pola tanam dan hasil panen petani. Serangan hama dan penyakit tanaman juga dipicu oleh perubahan iklim (Permana et al., 2018).

## B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi

penelitian ini dilakukan di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa beberapa dokumen yang peneliti kumpulkan berdasarkan beberapa hasil dari wawancara dengan informan. Pada penelitian ini, data sekunder digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tambahan dari berbagai media seperti buku dan jurnal, dokumentasi, dan laporan data pemerintah Desa Talontam.

Adapun sumber data yang digunakan adalah dari informan penelitian dan dokumentasi. Informan penelitian yang digunakan terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Kelompok Informan	Jumlah
1.	R. Helpi Alponso	Kepala Desa	1
2.	Dino Ardiansyah	Sekretaris Desa	1
3.	Irpanando	Ketua BPD	1
4.	- Marwan - Terri - Risman	Kelompok Tani	3
5.	Fitriyanto	Ketua kelompok tani	1
Jumlah Total			7

Sumber: Data olahan penulis, 2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif karena data-data yang diperoleh berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian. Setelah data dikumpulkan selanjutnya peneliti menganalisis, mendeskripsikan data, dan menarik kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Sektor Pertanian Pada Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

#### a) Pembangunan

Pemerintah Desa Talontam untuk menunjang peningkatan produksi padi dalam kegiatan pembangunan di sektor pertanian melakukan sejumlah pembangunan pertanian yang digunakan petani dalam peningkatan produksi padinya. Adapun berikut pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talontam yaitu pembuatan irigasi saluran air,

pengadaan bibit varietas unggul dan teknologi pertanian.

#### 1. Irigasi saluran air

Dalam pembangunan pertanian di Desa Talontam salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah desa guna mengatasi masalah kekurangan air terhadap padi yaitu membuat irigasi saluran air untuk mengalir sawah petani, dengan adanya saluran irigasi tersebut petani dapat mengalir sawah nya dengan air yang bersumber dari danau buatan di Desa Talontam, yang mana sebelum adanya irigasi air tersebut petani hanya mendapatkan air untuk sawahnya hanya dengan tadah hujan.

#### 2. Pengadaan bibit varietas unggul

Untuk menunjang peningkatan produksi padi, maka salah satu fungsi pemerintah Desa Talotam dalam pembangunan pertanian adalah memberikan fasilitas salah satunya adalah pemberian benih padi. Tujuan dari pemberian benih untuk petani agar hasil yang didapatkan oleh petani berkualitas tinggi dan dapat meningkat hasil panen yang akan didapatkan. Dikarenakan petani masih banyak yang menggunakan benih belum bersertifikat, maka melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan benih padi yang telah bersertifikat atau berlabel. Untuk pemberian varietas unggul pada petani telah dilakukan pembagian bibit unggul terhadap seluruh petani yang ada di Desa Talontam, yang mana hal ini tentu dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi padinya.

#### 3. Teknologi pertanian

Pemerintah Desa Talontam dalam upaya mempermudah proses produksi menyediakan beberapa teknologi yang membantu petani dalam pengolahan lahan dengan menggunakan mesin bajak yang disediakan oleh Desa Talontam. Untuk pengolahan lahan sawah yang dilakukan oleh mesin bajak yang disediakan oleh desa dilakukan diseluruh sawah petani yang ada

di Desa Talontam, pengolahan lahan sawah itu dilakukan tanpa biaya dibebankan kepada petani yang mana pemerintahlah yang menanggung beban biaya pengolahan lahan sawah tersebut.

#### b) Pelayanan

Pemerintah Desa Talontam untuk menunjang peningkatan produksi padi dalam juga melakukan pelayanan terhadap petani yang merupakan fungsi dari pemerintah. Adapun berikut pelayanan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talontam yaitu pendistribusian pupuk, benih dan pengendalian hama dan penyakit.

##### 1. Pendistribusian Pupuk

Selain pengadaan bibit unggul yang merupakan fungsi pemerintah dalam pembangunan di sektor pertanian, pemerintah desa juga melakukan fungsi pemerintah lainnya yaitu pelayanan, salah satu bentuk pelayanan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pendistribusian pupuk. Pupuk tersebut diperoleh oleh pemerintah desa dengan menganggarkan dana desa untuk pupuk, yang mana pupuk yang dianggarkan dalam pupuk tersebut dengan jenis pupuk kompos, selain itu pemerintah desa juga memperoleh pupuk dari pemerintah pusat dengan jenis pupuk organik.

##### 2. Pendistribusian Benih

Bentuk pelayanan pertanian yang dilakukan oleh Desa Talontam yang lainnya adalah pendistribusian benih, benih padi yang diberikan pemerintah kepada petani di Desa Talontam dapat diambil oleh petani sebelum musim tanam tiba.

##### 3. Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit pada padi menjadi keresahan bagi petani di Desa Talontam, dikarenakan dapat mengurangi jumlah produk serta dapat merusak tanaman padi, Hama dan penyakit juga dianggap sebagai keberadaannya sangat merugikan manusia, dalam konteks pertanian, maka yang sangat dirugikan adalah petani. Sehingga hama dan

penyakit harus dikendalikan atau dibasmi agar tidak mengganggu pertanian. Hama juga harus diberantas keberadaannya agar hasil produksi petani lebih optimal. Di Desa Talontam hama dan penyakit pada tanaman yang menyerang padi petani Desa Talontam antara lain, burung pipit, penggerek batang, keong dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Talontam melakukan pelayanan dalam hal pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi masarakat, Desa Talontam juga menyediakan berbagai solusi terhadap tersebut seperti contohnya penyediaan pestida, untuk hama seperti burung pipit biasanya petani desa mengusir hama tersebut dengan bunyi-bunyian dari kaleng kosong sehingga menimbulkan keributan dan membuat orang-orangan sawah dan membuat hama burung pipit pergi.

### 3) Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam hal ini dalam pembangunan pertanian dibidang ketahanan pangan, salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah bimbingan terhadap petani. Bimbingan menurut KBBI diartikan sebagai petunjuk atau penjelasan, cara mengerjakan sesuatu, atau tuntunan. Pemberian bimbingan merupakan salah satu tugas dari penyuluh pertanian. Menurut Mardikanto dalam Nursapitri & Endah (2021), penyuluh diartikan sebagai seseorang yang mewakili pemerintah atau Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang dalam proses pengadobsian inovasi. Salah satu tugas dari Penyuluh Pertanian Lapangan adalah meningkatkan Pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani.

Bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talontam dilakukan secara berkala melalui pertemuan kelompok tani, pertemuan kelompok tani yang ada di Desa Talontam biasanya dilakukan satu kali dalam satu bulan, didalam pertemuan ini

dibahas mengenai apa saja yang menjadi permasalahan petani dalam proses produksi padi.

## 2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Sektor Pertanian

### a. Minimnya APBDes di Sektor Pertanian

Minimnya jumlah APBDes menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Desa Talontam dalam pembangunan di sektor pertanian guna mendukung produksi padi didalam program ketahanan pangan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada pada latar belakang yang mana jumlah anggaran untuk sektor pertanian mengalami naik turun sehingga hal tersebut sehingga berdampak terhadap pembangunan pertanian yang ada di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. . Optimalisasi anggaran pendapatan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Talontam dan melakukan kerja sama bersama swasta agar dapat mengatasi masalah tersebut yang mana anggaran untuk sektor pertanian tersebut terbatas.

### b. Luas lahan

Desa Talontam memiliki luas lahan sawah seluas 45 hektar dengan hasil produksi padi yang diperoleh berjumlah 5,2 ton per hektarnya.

### c. Produktifitas Pangan

Produktivits pangan dalam prosesnya merupakan aspek penting untuk mendukung pembangunan disektor pertanian. Berikut ini adalah hasil produktivitas padi di Desa Talontam.

Tabel 2. Hasil produksi padi di Desa Talontam

No	Tahun	Hasil Produksi Padi
----	-------	---------------------

	Produksi Padi	
1	2019	4,6 Ton / Hektar
2	2020	5,4 Ton / Hektar
3	2021	5,2 Ton / Hektar

Sumber: Dokumen Desa Talontam, 2023.

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa terdapat naik turunnya hasil produksi padi di Desa Talontam, hal tersebut juga menjadi menjadi kendala dikarenakan dengan hasil tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pangan di Desa Talontam.

#### **d. Perubahan Iklim**

##### **1) Musim Kemarau**

Musim kemarau merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan di sektor pertanian pada Desa Talontam, musim kemarau dapat menyebabkan hasil produksi padi menjadi berkurang akibat kekurangan air yang didapati oleh tanaman padi bahkan bisa berpotensi gagal panen akibat kekeringan, dengan adanya permasalahan ini Pemerintah Desa Talontam mempunyai solusi dalam penanganannya, yaitu dengan pembuatan sumur bor dan pompa air, namun untuk sumur bor itu sendiri belum mampu dalam pemenuhan air untuk tanaman padi, dikarenakan untuk jumlah sumur yang dibangun oleh pemerintah desa jumlahnya sangat terbatas dikarenakan dana yang dianggarkan untuk solusi tersebut kurang. Untuk pompa air yang digunakan dalam menanggulangi musim kemarau pada tanaman padi di Desa Talontam jumlahnya juga terbatas akibat kekurangan dana yang ada sehingga belum mampu dalam pemenuhan air untuk tanaman padi di Desa Talontam.

##### **2) Banjir**

Selain musim kemarau banjir juga merupakan kendala pembangunan di sektor

pertanian pada Desa Talontam yang dapat menyebabkan hasil produksi padi menjadi berkurang akibat tanaman padi yang lama tergenang air bahkan bisa berpotensi gagal panen. Banjir merupakan salah satu kendala yang sampai saat ini masih belum didapati solusinya dari pemerintah desa, dikarenakan air yang tinggi ini disebabkan oleh luapan sungai batang kuantan yang berada di dekat persawahan petani di Desa Talontam.

#### **e. Kurangnya Infrastruktur Pertanian**

Kurangnya infrastruktur pertanian di Desa Talontam disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alokasi anggaran APBDes yang terbatas, prioritas pembangunan yang berbeda. Berikut adalah contoh kurangnya infrastruktur pertanian, irigasi yang masih terdapat beberapa sawah yang belum terairi dan juga terdapat yang rusak, akses jalan yang buruk dapat menghambat distribusi hasil pertanian.

##### **1) Saluran Irigasi**

Pembangunan saluran irigasi dapat membantu petani dalam mengairi sawahnya, di Desa Talontam pembangunan saluran irigasi ini belum merata ke seluruh sawah, sehingga terdapat beberapa sawah yang belum terairi oleh air yang berasal dari saluran irigasi air, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemerintah Desa Talontam hanya 50 % lahan sawah yang terairi saluran irigasi. selain itu juga terdapat beberapa titik saluran irigasi yang mengalami kerusakan akibat berbagai macam faktor, hal ini tentu menjadi kendala pemerintah dalam pembangunan di sektor pertanian di Desa Talontam.

##### **2) Sarana jalan**

Dalam hal pengangkutan hasil produksi padi terdapat kendala di Desa Talontam yaitu terdapat beberapa akses jalan yang kurang memadai menuju sawah di Desa Talontam, akses jalan tersebut belum mendapati perlakuan seperti semenisasi atau pemerataan ulang terhadap jalan, ketika

musim hujan jalan tersebut sangat licin sehingga dapat menghambat petani dalam hal pengangkutan hasil produksi maupun ketika proses produksi padi.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di sektor pertanian pada Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a) Dalam fungsi pemerintah bagian pembangunan melakukan fungsi pemerintahnya masih kurang baik walaupun masih terdapat pembangunan di bagian irigasi saluran air yang belum merata pembangunannya namun disisi lain di bagian pengadaan varietas unggul dan teknologi pertanian sudah baik.
- b) Dalam fungsi pemerintah bagian pelayanan, pemerintah Desa Talontam sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya.
- c) Dalam fungsi pemerintah bagian pemberdayaan, pemerintah Desa Talontam sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya.

Kemudian, kendala yang di hadapi pemerintah dalam pembangunan di sektor pertanian pada Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari: minimnya anggaran APBDes disektor pertanian, musim kemarau, banjir, saluran irigasi air, dan sarana jalan.

- a) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Talontam dalam pembangunan di sektor pertanian yaitu terbatasnya anggaran APBDes Desa Talontam di sektor pertanian yang menyebabkan belum terpenuhinya jumlah fasilitas

pertanian sepenuhnya guna menyokong hasil produksi padi yang ada. Pemerintah Desa Talontam masih belum mempunyai solusi untuk hal tersebut. Adapun solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa Talontam yaitu optimalisasi pendapat desa dan menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta guna dapat mengatasi permasalahan yang ada akibat dari minimnya APBDes.

- b) Luas lahan yang ada di Desa Talontam seluas 45 hektar dengan produktivitas hasil produksi sebanyak 4,5 ton perhektar pada tahun 2021 hal tersebut dapat dibilang hasil produktivitas rendah, hal tersebut dinilai belum mampu mencukupi untuk kebutuhan pangan di Desa Talontam, hal itu dibuktikan dengan masih terdapat masyarakat yang membeli beras impor dari daerah tetangga.
- c) Perubahan Iklim

Adapun perubahan iklim yang menjadi kendala di Desa Talontam yaitu musim hujan dan kemarau, untuk kendala musim kemarau yang dapat mengurangi hasil produksi dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen akibat kekeringan, pemerintah Desa Talontam memiliki solusi akan hal tersebut berupa adanya pembuatan sumur bor dan penyediaan pompa air untuk menanggulangi musim kemarau, namun dikarenakan keterbatasan jumlah sumur bor dan pompa air yang ada belum bisa mencukupi air untuk sawah petani di Desa Talontam. Kendala berikutnya yaitu banjir, sampai saat ini kendala yang disebabkan oleh banjir ini masih belum dapat untuk solusi nya dari pemerintah Desa

Talontam, dikarenakan air yang datang dari luapan air sungai batang kuantan tersebut tidak dapat dihindari.

d) Kurangnya infrastruktur pertanian

Pembangunan saluran irigasi yang ada di Desa Talontam belum merata ke seluruh sawah, sehingga terdapat beberapa sawah yang belum terairi oleh air yang berasal dari saluran irigasi air, selain itu juga terdapat beberapa titik saluran irigasi yang mengalami kerusakan akibat berbagai macam faktor, hal ini tentu menjadi kendala pemerintah dalam pembangunan di sektor pertanian pada Desa Talontam. Hal tersebut belum bisa teratasi dikarenakan adanya kekurangan dana.

Sarana jalan yang merupakan akses yang diperlukan oleh petani untuk menuju sawah mereka dalam hal produksi dan pengangkutan hasil produksi di Desa Talontam masih belum dapat diatasi, dikarenakan kekurangan dana yang ada masih belum dibangun untuk akses jalan tersebut.

Adapun saran terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Talontam sebagai pelaksana dari fungsi pemerintahan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait atas permasalahan yang ada, khususnya dalam hal kekurangan dana dalam membangun fasilitas pendukung pertanian pada padi. Selanjutnya bagi pemerintah Desa Talontam agar dapat menambah jumlah anggaran pada APBDes di tahun-tahun berikutnya dibidang pembangunan khususnya pertanian, agar fasilitas pertanian yang belum dibangun dapat segera terealisasi untuk menompang hasil produksi padi sehingga berimbas

kepada ketahanan pangan di Desa Talontam.

2. Bagi ketua kelompok tani agar selalu memperhatikan segala kekurangan atau kendala yang terdapat dalam menjalankan program di sektor pertanian khususnya padi, dengan begitu hal tersebut dapat menjadi evaluasi kedepan sehingga menjadi pertimbangan untuk lebih hasil yang lebih baik kedepannya.
3. Bagi masyarakat dan petani agar selalu mendukung program pemerintah desa guna mencapai kesejahteraan bersama melalui salah satu programnya yaitu di sektor pertanian khususnya padi.

## E. Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. CV Syakir MediaPress.
- Prastowo, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rasyid, M. R. (1997). Teori pemerintahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ristiadi, (2017). Pembangunan Infrastruktur Untuk Ketahanan Pangan Diperlukan.
- Sugiyono, (2019). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal:

- Arifin, B. (2018). Kontribusi Pertanian dalam Pembangunan dan Pengurangan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi, 26(1), 1-18.
- Akbar, Muh. Firyal, Srihandayani

- Suprpto, and Surati. (2018).”Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo.
- Ahmar, Mappamiring, and Anwar Parawangi. (2016). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2 No 2.
- Asmawati, Endahin, and Arif Herlambang. (2020). “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hasil Pertanian Ubi Jalar Di Desa Selotapak.” *PEDULI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat* 4(1): 1–12.
- Aridhayandi, R. M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48,(hlm.883–902).
- Agustina .S. (2022). Pemerintah desa (partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa).
- Ayu, A. S., & Purba, K. (2022). Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 1(02), 115-126.
- Arsyad, M. (2018). Peran Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 27-42.
- Badan Ketahanan Pangan. (2014). *Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2013*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan.
- Badan Ketahanan Pangan. (2018). *Rencanan aksi nasional ketahanan pangan*
- Dhiniharista, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*.
- Dewan Ketahanan Pangan. (2011). *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010– 2014*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan.
- Farhan Thariq, Eric, Eka Rofiyanti, and Dwi Agustina. (2023). “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 5(1): 111–15.
- Girsang, J.S. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemerintah Desa. *Jurnal Governansi*, 4(1), 41-52.
- Lepa, Oktavia, Sofie Pangemanan, and Ismail Rachman. (2019). “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pembangunan Pertanian (Studi Di Kecamatan Passi Timur).” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3(3): 1–10.
- Nur Fachri Kurniawan, Rustan IR. (2020). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Melalui Balai Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.” *MitzaL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi* 5(1): 27–38.
- Hapsari, N. I., dan Rudiarto, I. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang. *Jurnal Wilayah Dan*

- Lingkungan, 5(2), hh. 125– 140 .
- Ijayanti. D. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan DAERAH (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu). Skripsi Universitas Brawijaya.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. (2013). Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045: Menuju Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kemandirian pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi 31(1):1-13. 2018-2022. Badan ketahanan pangan kementerian pertanian RI.
- Mardiana. (2017). peran pemerintah daerah dalam peningkatan ketahanan pangan studi kasus di kabupaten Cirebon. Jurnal administrasi public, 5(2), 188-199.
- Nurdiyanto. (2020). Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia: tantangan dan peluang. Jurnal sosial ekonomi pertanian 13(1), 43-54.
- Purwaningsih (2018). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat ” Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 9(1):1.
- Permana. A.D, Nasution, Z., dan Mawardi, M.K. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Usahatani Padi Sawah di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi, 36(1), 19-36.
- Pemerintah Desa Talontam. 2023*
- Rachman, H.P.S., (2016), Aksesibilitas pangan: faktor kunci pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Jurnal Pangan, 19(2), hh. 147–156.
- Rachmat, M. (2014). Reposisi perencanaan pembangunan pertanian. hlm. 189-206. Dalam: Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Saliem, dan A. Hendriadi (eds.). Reformasi kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. Jakarta: IAARD Press.
- Rahman, Khairul. (2018). “Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab.” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 16(2): 34.
- Simbolon, Dewi Sarah et al. (2021). “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.” Jurnal Kewarganegaraan 5(2): 295–302.
- Setiawan, B. (2018). Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Jurnal Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), 151-160.
- Siagian, S.P. (2014). Peran Pemeintah Desa Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 128-135.
- Sumerta. (2019). Pemanfaatan dana desa untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Journal publicuho Vaulina, S., Kurniati, S. A., & Mulyani, S. (2021). Pemetaan ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru Propinsi Riau. DINAMIKA PERTANIAN, 37(3), 285-292.
- Tri Wahyuvi, Ninik, Rachmat Kriyantono, and Zulkarnaen. (2020). “Pola Komunikasi Pembangunan Terkait Pengelolaan Program Inovasi Desa Menuju Pemberdayaan

Masyarakat.” Jurnal Heritage 8(2):  
92–106.

Virginiya, and Kumayas. (2016). “Peran  
Pemerintah Dalam Mewujudkan  
Ketahanan Pangan Di Kabupaten  
Minahasa Selatan.” Governance  
1(4): 42– 56.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah